

## PENGARUH TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut)

**Fitri Sukmawati**

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

[Fitri.sukmawati@widyatama.ac.id](mailto:Fitri.sukmawati@widyatama.ac.id)

**Alfi Nurfitriani**

Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama

[alfifitriani8@gmail.com](mailto:alfifitriani8@gmail.com)

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. Variabel dalam penelitian ini terdiri dari transparansi, akuntabilitas sebagai variabel independen dan pengelolaan keuangan desa sebagai variabel dependen. Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah ordinal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey dengan pendekatan kuantitatif. Uji statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah validitas, reliabilitas, uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, koefisien determinasi, uji t dan uji F menggunakan aplikasi *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa, sedangkan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa. Akan tetapi secara simultan transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa dengan nilai kontribusi sebesar 29,2%.

**Kata kunci:** *Transparansi, Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa*

### PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 tentang Desa disebutkan bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai unit organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan segala latar belakang kepentingan dan kebutuhannya mempunyai peranan yang strategis, khususnya dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset Desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa, selain itu keuangan desa tersebut harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Presiden Joko Widodo meminta pengelolaan Dana Desa dilakukan sebaik-baiknya. Maka dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa, perlu adanya suatu aspek tata Pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Salah unsur utama dari *Good Governance* adalah Akuntabilitas. Jadi, Akuntabilitas pemerintahan sangat diperlukan sebagai penunjang penerapan otonomi Desa agar dapat berjalan

dengan baik (Putriyanti: 2012). Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa Transparansi dan Akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan Pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan yang baik (*Good Governance*). Transparansi ditandai oleh apakah kebijakan, regulasi, program, anggaran dan kegiatan pemerintah terbuka pada publik.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan kajian sistem terhadap pengelolaan keuangan desa, baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa. Kajian ini dilatari oleh diberlakukannya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang berimplikasi pada disetujuinya anggaran sejumlah Rp 20,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2015 yang akan disalurkan ke 74.093 desa di seluruh Indonesia. Per April 2015, pemerintah telah menyalurkan Dana Desa tahap pertama pada 63 Kabupaten senilai lebih dari Rp 898 miliar. Tahun 2016, dana transfer dari pemerintah pusat, yakni Dana Desa, sebesar Rp 46,7 triliun yang diberikan bagi sekitar 74.000 desa seluruh Indonesia. Setiap desa dengan rumus perhitungan anggaran mendapatkan kucuran Dana Desa rata-rata Rp 650 juta per tahun. Sementara kucuran dana transfer daerah dalam wujud ADD bervariasi besarnya. Sedangkan pada tahun 2017, ADD mencapai Rp 60 triliun.

Fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa saat ini yaitu masih adanya pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, seperti yang diungkapkan Risya Umami dan Idang Nurodin dalam jurnal ilmiah ilmu ekonomi, hal tersebut terjadi pada desa-desa di kecamatan Surade tepatnya di desa Jagamukti, Gunungsungging, Cipeundeuy dan Sukatani, yaitu pemerintah desa baik dalam menjalankan pemerintahannya maupun dalam mengelola keuangannya belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, sedangkan musyawarah desa merupakan salah satu akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai pengelolaan keuangan desa dan musyawarah desa merupakan kewajiban pemerintah desa dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, karena dalam pasal 54 menyatakan bahwa musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat desa memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kemudian dalam mengelola Alokasi Dana Desa (ADD), pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa belum tepat sasaran, dimana terdapat penyimpangan dana desa berkisar 5-10 persen dari alokasi. Dari sampel di 260 desa, diketahui 5-10 persen dana desa digunakan tidak sesuai peruntukan. Pimpinan KPK, Alexander Marwata, menyatakan sudah sekitar 300 pengaduan yang masuk ke KPK terkait penyimpangan penggunaan dana desa. Namun, KPK tidak bisa menindaklanjuti sendiri karena kepala desa bukan pejabat negara. Untuk itu, KPK melimpahkannya kepada aparat penegak hukum lainnya. Alexander menyarankan ada mekanisme administratif yang cepat untuk penanganan penyimpangan dana desa. Hukuman bisa berupa pemberhentian kepala desa dan penggantian dana desa yang diselewengkan. Sebab, kata Alexander, penanganan pidana korupsi di pengadilan tipikor akan sangat tidak efektif dan memakan biaya besar yang tak seimbang dengan uang yang dikorupsi kepala desa. (Kompas, 19 Mei 2017).

Sementara itu di Kabupaten Garut, menurut Bupati Garut, Rudy Gunawan, anggaran yang didapatkan pemerintah desa untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari ADD dan DAD (Dana Anggaran Desa) cukup besar yaitu hampir mencapai Rp 1,2 Miliar. Memang masih ada oknum perangkat desa yang terindikasi menyalahgunakan anggaran diluar ketentuan yang telah ditetapkan, ada empat desa yang terindikasi melakukan penyelewengan. Salah satunya yaitu yang dilakukan oleh Kepala Desa Cigagade, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Jawa Barat, yang langsung digelandang ke Markas Polsek Limbangan, setelah terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT). Kepala Desa, bernama Yanyan itu diduga melakukan

korupsi Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp500juta lebih (viva.co.id). Selain itu, menurut Sekretaris Apdesi Kabupaten Garut, Imat Rohimat mengatakan bahwa semenjak banyaknya dana yang datang ke Desa, dalam masalah administrasi, sering sekali terjadi kesalahpahaman, dikarenakan sumber daya manusia yang ada di Desa yang dinilai masih minim. Salah satu kasus yang sering kali diadakan ialah banyaknya pemotongan pajak PPH dan PPN yang dilakukan langsung oleh pihak Bank, sementara jika sudah ada pencairan tidak langsung dipotong di Bank melainkan dijumlah ketika sudah dibelanjakan (pikiran-rakyat.com). Seperti yang dikatakan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kabupaten Garut Jatjat Darajat melalui Kepala Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Bidang Pemerintahan Desa, Herna Suwarya, sebelum pencairan dana desa tahap II memang terdapat sekitar 170 desa terancam tak dapat mencairkan dana desa karena terjadi pemblokiran rekening. Hal itu akibat desa-desa tersebut masih tersangkut pelunasan kewajiban pembayaran pajak ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang jauh di bawah standar. Dia juga menyayangkan masih banyak desa terindikasi tak mematuhi ketentuan mengenai transparansi penggunaan dana desa yang diterima ke masyarakat. Menurut aturan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) termasuk dana desa itu mestinya diumumkan atau dipampang secara terbuka di tempat yang mudah dilihat agar diketahui masyarakat. Namun kenyataannya, tidak seperti itu (inilahkoran.com).

Beberapa penelitian telah dilakukan sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Risyia Umami dan Idang Nurodin dalam jurnal yang berjudul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa, dimana dari hasil penelitian tersebut transparansi dan akuntabilitas terbukti memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa. Selain itu penelitian juga dilakukan oleh I Putu Andi SuarJaya Putra, Kadek Sinarwati, dan Made Arie Wahyuni yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng, dimana hasil penelitian tersebut juga menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh dalam pengelolaan ADD, termasuk juga peran partisipasi masyarakat juga mempengaruhi pengelolaan ADD di Desa Bubunan.

## STUDI PUSTAKA

Pengertian desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 pasal 1 menjelaskan bahwa:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam Subroto (2009) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan penanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban. Akuntabilitas adalah hal yang penting untuk menjamin nilai-nilai seperti efisiensi, efektivitas, reliabilitas dan prediktibilitas. Suatu akuntabilitas tidak abstrak tapi konkrit dan harus ditentukan oleh hukum melalui seperangkat prosedur yang sangat spesifik mengenai masalah apa saja yang harus dipertanggungjawabkan.

Sulistiyani dalam Subroto (2009) menyatakan bahwa transparansi dan akuntabilitas adalah dua kata kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun penyelenggaraan perusahaan. Dinyatakan juga bahwa dalam akuntabilitas terkandung kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan segala kegiatan terutama dalam bidang administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi. Akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan memberikan akses kepada semua pihak yang berkepentingan. Bertanya atau menggugat penanggungjawaban para pengambil keputusan dan pelaksanaan baik ditingkat program, daerah dan masyarakat.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris pengaruh aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Cilawu-Kabupaten Garut.

Berdasarkan landasan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Kompetensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004:14). Pendapat tersebut sejalan dengan beberapa penelitian. Penelitian tersebut pernah dilakukan oleh Subroto (2009), Irma (2015), Fajri (2015), Aziz (2016), Dewi (2016), dan Makalalag (2017). Hasil penelitian menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

**H1: Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

2. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Komitmen organisasi berkaitan erat dengan akuntabilitas. Beberapa pakar mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah : Cavoukian *et al* (2010: 408), bahwa komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Komitmen organisasi merupakan salah satu elemen

penting dalam akuntabilitas. Behnam dan MacLean (2011:49), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Brown dan Moore (2001:20), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen. Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

**H2: Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Menurut Crook dan Sverrisson dalam Devas dan Grant (2003:309)

Akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat miskin, dan untuk membuat pembangunan lebih berpihak pada orang miskin. Sebagai mekanisme dalam pertanggungjawaban, partisipasi dilakukan mulai dari evaluasi sampai pelaporan. Seperti Los Angeles, partisipasi merupakan cara untuk meningkatkan akuntabilitas sebagai tanggapan yang muncul terhadap tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Banyak warga yang menyalahkan pejabat dalam pengambilan keputusan (Kim dan Schachter, 2013:462). Perumusan hipotesis adalah sebagai berikut :

**H3: Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.**

## METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data. Sesuai dengan pengertian objek penelitian yang dikemukakan oleh Nuryaman dan Veronica (2015:5) bahwa: "Objek penelitian adalah karakteristik yang melekat pada subjek penelitian. Karakteristik ini jika diberikan nilai maka nilainya akan bervariasi (berbeda) antarindividu satu dengan yang lain".

Adapun objek dalam penelitian ini meliputi transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan desa. Subjek dalam penelitian ini adalah aparaturnya Pemerintah Desa.

### Populasi Dan Sampel Penelitian

Sugiyono (2011) menyatakan bahwa populasi adalah sebagai berikut: "Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa di Kabupaten Garut. Populasi dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam tabel.

**Tabel 1. Populasi Penelitian**

No.	Kecamatan	Jml Desa	No.	Kecamatan	Jml Desa
1	Cihurip	4	22	Cibatu	11
2	Karangtengah	4	23	Cikelet	11
3	Cibiuk	5	24	Cisompet	11
4	Cigedug	5	25	Garut Kota	11
5	Mekarmukti	5	26	Sukawening	11
6	Pamulihan	5	27	Cikajang	12
7	Caringin	6	28	Leles	12
8	Kersamanah	6	29	Pasirwangi	12
9	Peundeuy	6	30	Tarogong Kidul	12
10	Selaawi	7	31	Bungbulang	13
11	Sucinaraja	7	32	Pakenjeng	13
12	Sukaesmi	7	33	Samarang	13
13	Talegong	7	34	Tarogong Kaler	13
14	Leuwigoong	8	35	Blubur Limbangan	14
15	Pameungpeuk	8	36	Kadungora	14
16	Pangatikan	8	37	Banyuresmi	15
17	Cisewu	9	38	Cisurupan	17
18	Singajaya	9	39	Bayongbong	18
19	Wanaraja	9	40	Cilawu	18
20	Banjarwangi	11	41	Karangpawitan	20
21	Cibalong	11	42	Malangbong	24
<b>Total Desa</b>					<b>442</b>

Sedangkan menurut Sugiyono (2011:81) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Metode sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *simple random sampling*, merupakan tipe pemilihan sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.

Setiap unit *sampling* sebagai unsur populasi yang terpicil memperoleh peluang yang sama untuk menjadi sampel atau mewakili populasinya. Desa-desa yang akan menjadi sampel dalam penelitian ini akan dijelaskan dalam tabel

Tabel 2. Sampel Penelitian

No.	Nama Desa	No.	Nama Desa	No.	Nama Desa
1	Sindangprabu	11	Sadang	21	Cimurah
2	Wanamekar	12	Linggamukti	22	Lebakagung
3	Wanasari	13	Cigadog	23	Godog
4	Wanajaya	14	Sukalaksana	24	Situsari
5	Wanaraja	15	Situsaeur	25	Sindanglaya
6	Sukamenak	16	Situjaya	26	Karangsari
7	Cinunuk	17	Mekarsari	27	Sindanggalih
8	Tegalpanjang	18	Tanjungsari	28	Jatisari
9	Sukaratu	19	Suci	29	Karangpawitan
10	Tenjonagara	20	Sindangpalay	30	Situgede

Penelitian ini merupakan penelitian eksplanatori, yaitu suatu metode penelitian yang bermaksud untuk mendapatkan kejelasan fenomena yang terjadi secara empiris dan berusaha untuk mendapatkan jawaban hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:6) Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang tujuannya untuk memperoleh jawaban tentang “bagaimana” dan “mengapa” suatu fenomena terjadi.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey. Metode survey adalah suatu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada, mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah. Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:79) Survei adalah cara pengumpulan data dengan melakukan komunikasi dengan responden sebagai sumber informasi, dalam rangka memperoleh informasi dan data tentang variabel penelitian yang sedang menjadi perhatian peneliti.

### Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dilakukan dengan cara mengamati dimensi, sisi-sisi, ciri-ciri perilaku dari suatu konsep, kemudian menerjemahkan dalam elemen-elemen yang dapat diobservasi dan diukur agar dapat dibuat atau dikembangkan indeks pengukuran dari konsep-konsep tersebut (Nuryaman dan Veronica, 2015:90). Untuk menguji hipotesis yang diajukan, variabel yang diteliti dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

#### 1. Variabel Dependen (Y)

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:43) Variabel dependen adalah variabel yang menjadi perhatian peneliti, karena variabel ini yang sering dianggap sebagai masalah penelitian. Dalam penelitian ini, Pengelolaan Keuangan Desa menjadi variabel dependen yang dinotasikan sebagai variabel Y.

#### 2. Variabel Independen (X)

Menurut Nuryaman dan Veronica (2015:42) Variabel independen adalah variabel dapat mempengaruhi variabel dependen. Dengan kata lain, perubahan nilai (*variance*) pada variabel independen dapat menyebabkan perubahan nilai variabel dependen. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel independen yang digunakan, pertama adalah Transparansi sebagai variabel X1 dan yang kedua adalah Akuntabilitas yang dinotasikan sebagai variabel X2.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada sub bab ini penulis akan menguraikan hasil survey yang telah diperoleh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Garut dengan mengambil sampel sebanyak 30 Desa. Untuk menjelaskan latar belakang responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, maka dibuatkan tabel deskripsi profil

responden. Deskripsi profil responden terdiri dari jenis kelamin, usia, jenjang pendidikan, dan lama bekerja. Adapun data yang penulis peroleh mengenai profil responden adalah sebagai berikut.

**Tabel 3. Deskripsi Profil Responden**

No.	Keterangan	Frekuensi	Persentase
1.	Jenis Kelamin		
	a. Pria	48	80%
	b. Wanita	12	20%
	Jumlah	60	100%
2.	Usia		
	a. 10-20 Tahun	0	0%
	b. 21-30 Tahun	7	11,67%
	c. 31-40 Tahun	16	26,67%
	d. 41-50 Tahun	23	38,33%
	e. >50 Tahun	14	23,33%
	Jumlah	60	100%
3.	Jenjang Pendidikan		
	a. SMA/SMK	47	78,34%
	b. D3	2	3,33%
	c. S1	8	13,33%
	d. Lain-lain	3	5%
	Jumlah	60	100%
4.	Lama Bekerja		
	a. < 1 Tahun	2	3,33%
	b. 1-5 Tahun	29	48,33%
	c. 5-10 Tahun	19	31,67%
	d. >10 Tahun	10	16,67%
	Jumlah	60	100%

Sumber: Kuesioner (diolah)

Berdasarkan tabel 4 pada klasifikasi jenis kelamin, 60 orang yang menjadi responden dalam penelitian ini berjenis kelamin pria dengan persentase sebesar 80% sedangkan wanita sebesar 20%. Pada klasifikasi usia, responden dalam penelitian ini paling banyak berusia antara 41-50 tahun dengan persentase sebesar 38,33% sedangkan responden paling sedikit yaitu berusia 21-30 tahun dengan persentase sebesar 11,67%. Pada klasifikasi jenjang pendidikan, responden dalam penelitian ini paling banyak berada pada jenjang pendidikan SMA/SMK dengan persentase sebesar 78,34% sedangkan paling sedikit jenjang pendidikan D3 dengan persentase sebesar 3,33%. Pada klasifikasi lama bekerja, responden dalam penelitian ini paling banyak bekerja antara 1-5 tahun dengan persentase sebesar 48,33% sedangkan yang paling sedikit bekerja < 1 tahun dengan persentase sebesar 3,33%.

### Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas

#### Uji Validitas

Hasil uji validitas terhadap variabel transparansi dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 5. Validitas Variabel Transparansi**

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0.747	0.2542	Valid
P2	0.739	0.2542	Valid
P3	0.822	0.2542	Valid
P4	0.574	0.2542	Valid

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabel 5 hasil uji validitas untuk variabel transparansi tersebut memenuhi kriteria validitas yaitu nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai koefisien validitas diatas 0,2542 yang menunjukkan bahwa seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid. Sedangkan untuk hasil uji validitas terhadap variabel akuntabilitas sebagai berikut:

**Tabel 6. Validitas Variabel Akuntabilitas**

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0.558	0.2542	Valid
P2	0.707	0.2542	Valid
P3	0.835	0.2542	Valid
P4	0.805	0.2542	Valid
P5	0.505	0.2542	Valid
P6	0.746	0.2542	Valid
P7	0.788	0.2542	Valid
P8	0.749	0.2542	Valid

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabel 6 hasil uji validitas untuk variabel akuntabilitas tersebut memenuhi kriteria validitas yaitu nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai koefisien validitas diatas 0,2542 yang menunjukkan bahwa seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid. Sedangkan untuk hasil uji validitas terhadap variabel pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

**Tabel 7. Validitas Variabel Pengelolaan Keuangan Desa**

Pertanyaan	Rhitung	Rtabel	Keterangan
P1	0.588	0.2542	Valid
P2	0.695	0.2542	Valid
P3	0.689	0.2542	Valid
P4	0.823	0.2542	Valid
P5	0.775	0.2542	Valid
P6	0.822	0.2542	Valid
P7	0.827	0.2542	Valid
P8	0.823	0.2542	Valid
P9	0.836	0.2542	Valid
P10	0.684	0.2542	Valid
P11	0.778	0.2542	Valid

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabel hasil uji validitas untuk variabel pengelolaan keuangan desa tersebut memenuhi kriteria validitas yaitu nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ . Dapat dilihat bahwa seluruh pernyataan memiliki nilai koefisien validitas diatas 0,2542 yang menunjukkan bahwa seluruh pernyataan tersebut dinyatakan valid.

**Uji Reliabilitas**

Hasil uji reliabilitas terhadap variabel transparansi dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

**Tabel 7. Reliabilitas Variabel Transparansi**  
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.691	4

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabe 7 menunjukkan nilai Alpha Cronbach's diperoleh sebesar 0.691 maka variabel transparansi dinyatakan reliabel. Sedangkan hasil uji reliabilitas terhadap variabel akuntabilitas sebagai berikut:

**Tabel 8. Reliabilitas Variabel Akuntabilitas**  
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.826	8

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabel menunjukan nilai Alpha Cronbach's diperoleh sebesar 0.826 maka variabel akuntabilitas dinyatakan reliabel. Sedangkan hasil uji reliabilitas terhadap variabel pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

**Tabel 9. Reliabilitas Variabel Pengelolaan Keuangan Desa**  
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.924	11

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan tabel 9 menunjukan nilai Alpha Cronbach's diperoleh sebesar 0.924 maka kuesioner dinyatakan reliabel.

**Hasil Pengujian Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas**

Hasil pengujian untuk normalitas data variabel  $X_1$ , variabel  $X_2$ , dan variabel Y menggunakan teknik *One-Sample Kolmogrov-Smirnov test* dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 10. Hasil Uji Normalitas**  
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0E-7
	Std. Deviation	568.58471686
	Absolute	.074
Most Extreme Differences	Positive	.065
	Negative	-.074
Kolmogorov-Smirnov Z		.572
Asymp. Sig. (2-tailed)		.899

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Output SPSS 20

Tabel 10 menjelaskan bahwa nilai signifikansi yang diperoleh nilai residual (*Unstandardized Residual*) dari ketiga variabel tersebut memiliki nilai signifikansi sebesar 0,899. Nilai probabilitas yang diperoleh dari hasil uji normalitas lebih besar dari 0,05 ( $0,899 > 0,05$ ) artinya data yang digunakan berdistribusi normal, dengan kata lain bahwa asumsi normalitas data terpenuhi.

**Uji Multikolinearitas**

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil uji multikolinearitas sebagai berikut:

**Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 X1	.429	2.331
X2	.429	2.331

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan data yang disajikan tabel 11 hasil uji multikolinearitas, menunjukkan bahwa nilai *tolerance* yang diperoleh masing-masing sebesar 0,429. Dan nilai *Variance Inflation Factor* yang diperoleh masing-masing sebesar 2,331. Hasil uji multikolinearitas yang diperoleh memenuhi syarat yaitu nilai *tolerance* > 0,1 dan *Variance Inflation Factor* kurang dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ditemukan adanya korelasi yang kuat diantara variabel bebas, sehingga asumsi multikolinearitas data terpenuhi.

**Uji Heteroskedastisitas**

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, diperoleh hasil uji heteroskedastisitas tidak terjadi heteroskedastisitas

**Hasil Analisis Regresi Linier Berganda**

Hasil analisis regresi linier berganda berdasarkan output dari *software* SPSS yang digunakan dalam mengolah data, hasil ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 12. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2289.419	655.546		3.492	.001
	X1	-.094	.202	-.079	-.465	.644
	X2	.595	.170	.597	3.509	.001

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS 20

**Pembahasan**

**Variabel Transparansi**

a. Informatif

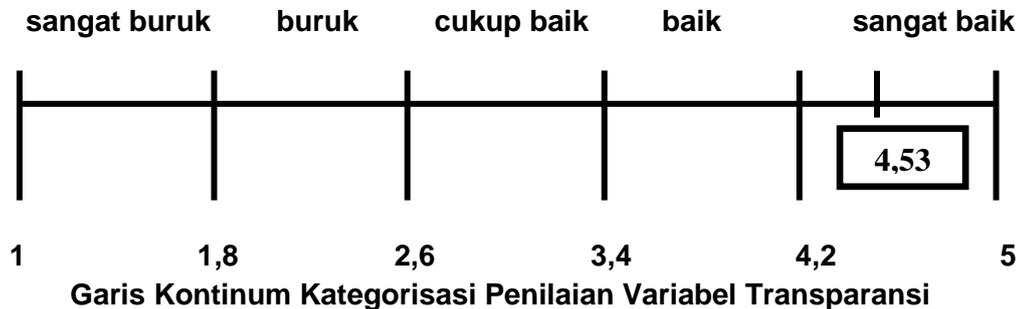
Berdasarkan pengolahan data dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk dimensi informatif adalah sebesar 91,17% dengan mean skor sebesar 4,56 termasuk dalam kategori sangat baik.

b. Pengungkapan

Berdasarkan pengolahan data dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk dimensi pengungkapan adalah sebesar 89,83% dengan mean skor sebesar 4,49 termasuk kategori sangat baik.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh informasi bahwa total skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel transparansi

adalah sebesar 1086 dan skor ideal sebesar 1200, sedangkan nilai total persentase yang diperoleh adalah sebesar 90,5% dan nilai mean skor sebesar 4,53 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa transparansi yang dilakukan 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut terhadap masyarakat sangat baik. Kategori tersebut jika digambarkan dengan menggunakan garis kontinum adalah sebagai berikut.



**Variabel Akuntabilitas**

a. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum

Nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk dimensi akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum adalah sebesar 87,11% dengan mean skor sebesar 4,53 termasuk kategori sangat baik.

b. Akuntabilitas Proses

Nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk dimensi akuntabilitas proses adalah sebesar 92% dengan mean skor sebesar 4,6 termasuk kategori sangat baik. .

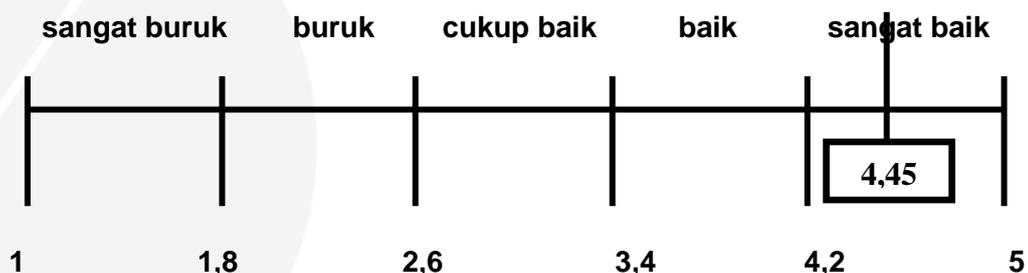
c. Akuntabilitas Program

Nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk dimensi akuntabilitas proses adalah sebesar 82,67% dengan mean skor sebesar 4,13 termasuk kategori baik.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk dimensi akuntabilitas proses adalah sebesar 87,17% dengan mean skor sebesar 4,35 termasuk kategori sangat baik.

e. Berdasarkan pengolahan data diperoleh informasi bahwa total skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel akuntabilitas adalah sebesar 2107 dan skor ideal sebesar 2400, sedangkan nilai total persentase yang diperoleh adalah sebesar 87,79% dan nilai mean skor sebesar 4,45 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas yang dilakukan 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut terhadap masyarakat sangat baik. Kategori tersebut jika digambarkan dengan menggunakan garis kontinum adalah sebagai berikut.



**Variabel Pengelolaan Keuangan Desa**

a. Perencanaan

Berdasarkan pengolahan data dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk dimensi perencanaan adalah sebesar 88,17% dengan mean skor sebesar 4,41 termasuk kategori sangat baik.

b. Pelaksanaan

Berdasarkan pengolahan data dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk dimensi pelaksanaan adalah sebesar 88,44% dengan mean skor sebesar 4,42 termasuk kategori sangat baik.

c. Penatausahaan

Berdasarkan pengolahan data dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk dimensi penatausahaan adalah sebesar 91,33% dengan mean skor sebesar 4,57 termasuk kategori sangat baik.

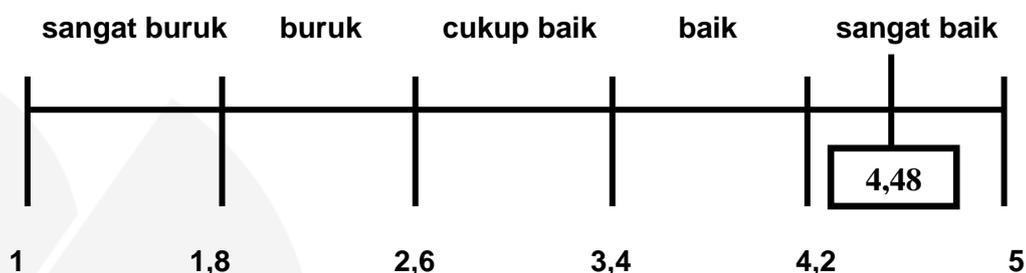
d. Pelaporan

Berdasarkan pengolahan data dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk dimensi pelaporan adalah sebesar 90,17% dengan mean skor sebesar 4,51 termasuk kategori sangat baik.

e. Pertanggungjawaban

Berdasarkan pengolahan data dapat diketahui bahwa nilai persentase total skor tanggapan responden yang diperoleh dari pernyataan-pernyataan yang membentuk dimensi pertanggungjawaban adalah sebesar 90,67% dengan mean skor sebesar 4,53 termasuk kategori sangat baik.

Berdasarkan pengolahan data diperoleh informasi bahwa total skor aktual yang diperoleh dari seluruh pernyataan-pernyataan yang membentuk variabel pengelolaan keuangan desa adalah sebesar 2960 dan skor ideal sebesar 3300, sedangkan nilai total persentase yang diperoleh adalah sebesar 89,69% dan nilai mean skor sebesar 4,48 termasuk dalam kategori sangat baik. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang dilakukan 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut sudah dilakukan sesuai dengan Permendagri No.113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kategori tersebut jika digambarkan dengan menggunakan garis kontinum adalah sebagai berikut.



**Garis Kontinum Kategorisasi Penilaian Variabel Pengelolaan Keuangan Desa Pengaruh Transparansi terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil uji t-statistik, diperoleh nilai signifikansi variabel transparansi sebesar  $0,644 > 0,05$  (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu juga dapat dilihat dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar  $-0,465$  sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar  $\pm 2,00247$ . Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} < t_{tabel}$  yaitu  $-0,465 < 2,00247$ , maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel pengelolaan keuangan desa. Kontribusi

transparansi ( $X_1$ ) terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) hanya sebesar -2,9388%. Kekurangan dari hasil pengujian variabel transparansi ini berada pada dimensi pengungkapan, artinya pengungkapan dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut belum dilaksanakan dengan baik.

Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Andianto Asdi Sangki, Ronny Gosal, dan Josef Kairupan (2016) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa tidak adanya transparansi mengenai anggaran yang dikelola pemerintah desa sehingga masyarakat pada umumnya tidak mengetahui secara terperinci tentang APBDes. Bahkan transparansi tidak membawa dampak atau pengaruh positif kepada tata pemerintahan desa serta keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan tidak diketahui oleh masyarakat. Rendahnya tingkat transparansi dalam bentuk kurangnya sosialisasi terhadap berbagai produk hukum akan membuat pelanggaran hukum meningkat karena masyarakat tidak mengetahui berbagai peraturan perundangan yang mengatur kehidupan mereka. Melalui transparansi akan terciptanya kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat karena masyarakat mengetahui apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah. Kepercayaan dari masyarakat terhadap pemerintah merupakan modal yang penting untuk berjalannya pemerintahan.

### **Pengaruh Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil uji t-statistik, diperoleh nilai signifikansi variabel akuntabilitas sebesar  $0,001 < 0,05$  (taraf nyata signifikansi penelitian). Selain itu juga dapat dilihat dari hasil perbandingan antara  $t_{hitung}$  dengan  $t_{tabel}$  yang menunjukkan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,509 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  sebesar  $\pm 2,00247$ . Dari hasil tersebut terlihat bahwa  $t_{hitung} > t_{tabel}$  yaitu  $3,509 > 2,00247$ , maka dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel akuntabilitas berpengaruh terhadap variabel pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas ( $X_2$ ) memberikan kontribusi paling dominan terhadap pengelolaan keuangan desa (Y) dengan kontribusi sebesar 32,0589%. Kekurangan dari hasil pengujian variabel akuntabilitas ini berada pada dimensi akuntabilitas program, artinya program alternatif untuk mengantisipasi jika ada program yang belum terealisasi dengan baik dalam pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut belum sepenuhnya direncanakan.

### **Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa**

Berdasarkan hasil uji F-statistik, diperoleh nilai signifikansi model regresi secara simultan sebesar 0,000. Nilai ini lebih kecil dari *significance level* 0,05 (5%), yaitu  $0,000 < 0,05$ . Selain itu hasil perbandingan antara  $F_{hitung}$  dan  $F_{tabel}$  menunjukkan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 11,726 sedangkan nilai  $F_{tabel}$   $\pm 3,16$ . Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai  $F_{hitung} > F_{tabel}$  yaitu  $11,726 > 3,16$ , maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan atau bersama-sama transparansi dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa yang dilakukan oleh 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut. Dapat dilihat juga dari hasil uji koefisien determinasi secara simultan, bahwa transparansi dan akuntabilitas memberikan kontribusi terhadap pengelolaan keuangan desa sebesar 29,2% sedangkan sisanya sebesar 70,8% lainnya merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Transparansi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.
2. Akuntabilitas berpengaruh terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.
3. Transparansi dan akuntabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan desa pada 30 Pemerintah Desa di Kabupaten Garut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin. 2007. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didjaja, Mustofa. 2003. *Transparansi Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. 21 Update PLS Regresi*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul dan Muhamad Ikbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Kristianten. 2006. *Transparansi Anggaran Pemerintah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lalolo, Loina Krina P. 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: BAPPENAS
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2003. *Pedoman Penyusunan dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Airlangga.
- Mahmudi. 2013. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nuryaman dan Veronica Christina. 2015. *Metodologi Penelitian Akuntansi dan Bisnis: Teori Dan Praktik*. Cetakan Pertama. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Santoso, Singgih. 2012. *Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Sekaran, Uma. 2009. *Metode Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soleh, Chabib dan Heru Rochmansjah. 2015. *Pengelolaan Keuangan Desa*. Bandung: Fokus Media.
- Sudjana. 2005. *Metoda Statistika*. Bandung: Tarsito.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyani. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Umar, Husein. 2003. *Metodologi Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Adianto Asdi Sangki, Ronny Gosal dan Josef Kairupan. 2016. *Penerapan Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Suatu Studi Di Desa Tandu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*. Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP-Unsrat.
- Aprisiami, Putriyanti. 2012. *Penerapan Otonomi Desa Dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Aglik, Kecamatan Grabag, Kabupaten Puger*.
- Damayanti, Wienda. 2018. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus: Desa Tegiri dan Desa Sumberagung Kecamatan Batuwarno, Kabupaten Wonogiri)*. Publikasi Ilmiah. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Faridah dan Bambang Suryono. 2015. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES)*. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, Volume 4 Nomor 5.
- Kumalasari, Deti. 2016. *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi, Volume 5 Nomor 11.
- Miriam. 2012. *Penerapan Otonomi dalam Menguatkan Akuntabilitas Pemerintah Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Aglik Kecamatan Grabag Kabupaten Purworejo*. Yogyakarta: UNY.

- Muh. Akil Rahman, Memen Suwandi, dan Alfian Hamid. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Pencapaian Good Governance (Studi Empiris di Kecamatan Bontomarannu Kabupaten Gowa)*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa. 2017. *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang*. Jurnal Ilmu Akuntansi, Volume 10 Nomor 2.
- Nahrudin, Zulfan. 2014. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Alokasi Desa di Desa Pao-Pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 4 Nomor 2.
- Pradana, I Made dan Ayu Komang, Anantawikrama. 2014. *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Studi Interpretif pada Organisasi Publik Non Pemerintah)*.
- Putu Andi Suar Jaya Putra, Kadek Sinarwati dan Made Arie Wahyuni. 2017. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan Kecamatan Seririt Kabupaten Buleleng*. Jurnal Akuntansi Program S1, Volume 8 Nomor 2.
- Umami, Risyah dan Idang Nurodin. 2017. *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi, Volume 6 Edisi 11.
- Hendy S, Aep. 2017. *Ada 4 Desa di Garut, Terkait Kasus Korupsi Dana Desa*. (<https://kabarpriangan.co.id/ada-4-des-a-di-garut-terkait-kasus-korupsi-dana-des-a/>, Diakses 22 Februari 2018).
- Iqbal Maulud, Mochammad. 2016. *Kades di Garut Minta Perlindungan Hukum*. (<http://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/2016/01/13/356988/kades-di-garut-minta-perlindungan-hukum>, Diakses 25 Februari 2018).
- Viva. 2017. *Kepala Desa di Garut Tertangkap Tangan Korupsi Dana Desa*. (<https://www.viva.co.id/berita/nasional/887456-kepala-des-a-di-garut-tertangkap-tangan-korupsi-dana-des-a>, Diakses 24 Februari 2018).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.